

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS KORUPSI E-KTP SETYA NOVANTO HARIAN KOMPAS & PIKIRAN RAKYAT

**(Studi Deskriptif Kualitatif Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP Setya
Novanto Harian Kompas & Pikiran Rakyat 1 – 31 Desember 2017)**

ANALYSIS FRAMING THE CASE OF SETYA NOVANTO E-KTP DAILY KOMPAS & PIKIRAN RAKYAT

***(Qualitative Descriptive Studies of Communication Behavior in Terms of Analysis
Framing The Case Of Setya Novanto E-KTP Daily Kompas & Pikiran Rakyat 1 – 31
December)***

Muhammad Rizal Wardana¹. Hanny Latifah². Zikri Fachrul Nurhadi³

e-mail: rizalwardana@gmail.com

Jurnalistik

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Garut

ABSTRAK

Moch Rizal Wardana 2402714104. Judul Penelitian ini adalah : “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto Harian Kompas & Harian Pikiran Rakyat”.

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya pemberitaan mengenai kasus korupsi e-KTP oleh Setya Novanto dan menyeret nama pejabat lain nya. Dengan kasus Korupsi e-KTP ini masyarakat mempunyai rasa keingin tahun lebih dengan adanya tersangka yang menyeret nama nama pejabat selain Setya Novanto. Harian Kompas dan Pikiran Rakyat sangat gencar dalam memberitakan berita tersebut karena kasus mega korupsi e-KTP ini sangat menjadi trending topik di dalam masyarakat. Yang berawal dari putusan PraPeradilan hinga Setya Novanto resmi menjadi tersangka yang terbaru Setya Novanto Membuat Masyarakat Tercengang dengan Kehidupan nya di Lapas Suka Miskin pada saat OTT oleh KPK.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing dengan pendekatan kualitatif. Adapun paradigma yang digunakan adalah paradgma konstruktivisme. Teknik pengumpulan yaitu teknik observasi dan wawancara. Yang menjadi objek penelitian

adalah Harian Kompas & Harian Pikiran Rakyat sebagai media cetak yang mempunyai ciri khas masing masing baik di tingkat regional / nasional. Analisis framing yang digunakan yaitu analisis framing Robert N. Entman dengan empat konsep yaitu Identifikasi masalah, sumber masalah, nilai moral dan penyelesaian masalah.

Hasil Penelitian menunjukkan empat analisis berita yaitu, Harian Kompas dan Harian Pikiran Rakyat dalam mengidentifikasi masalah mengambil dari fenomena sosial seperti pada kasus mega korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto dan nama pejabat lain nya. Karena *bad news is good* karena media ingin meraup keuntungan sebesar besarnya dari berita tersebut. Dalam melihat penyebab masalah Harian Kompas dan Harian Pikiran Rakyat mengambil aktor yang menjadi kunci di dalam kasus tersebut. Pada Kasus Korupsi e-KTP Harian Kompas dan Harian Pikiran mengambil sudut pandang Setya Novanto karena Setya Novanto adalah ketua DPR dan mempunyai efek yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan negara. Nilai moral yang disajikan biasanya mencatumkan keterangan dari narasumber agar berita tersebut kuat dan nampak secara wajar. Dalam penyelesaian masalah biasanya Harian Kompas dan Harian Pikiran Rakyat terdapat pada paragraf 2 / paragraf terakhir. Jadi dalam membuat berita Harian Kompas dan Harian Pikiran Rakyat mempunyai cara tersendiri dalam memFrame berita agar bisa di terima oleh masyarakat dan berita tersebut menjadi hal penting bagi masyarakat.

Kata kunci: Analisis Framing Robert N. Entman, e-KTP, Harian Kompas & Harian Pikiran Rakyat , Konstruktivisme.

ABSTRACT

Moch Rizal Wardana 2402714104. This research title is: "Framing Analysis Reporting Cases Novanto corruption E-KTP Daily Kompas & Pikiran Rakyat".

The background of this research with the proliferation of news about corruption cases e-ID card by dragging Novanto and other officials of his name. With the e-KTP corruption cases these people have a sense of curiosity more with a suspect who dragged the names of officers other than Novanto. Kompas and Mind is very intense in reporting the news for mega corruption cases e-ID card is very a trending topic in the community. Which originated from a pretrial ruling Novanto hingga officially become the latest suspect Novanto Make Life Community Stunned by her in prison Love Poor when OTT by the Commission.

The method used in this study yatu framing analysis with a qualitative approach. The paradigm used is paradgma constructivism. Collection techniques are observation and interview techniques. The research object is Kompas Daily and People's Daily Thoughts as

print media which have characteristics of each well at regional / national level. Analysis of framing used by an analysis of framing Robert N. Entman with four concepts, namely identification of the problem, the source of the problem, moral values and problem resolution.

The results of this study indicate four news analysis, namely, Kompas Daily and People's Daily Thoughts in identifying problems taking on the social phenomenon as in the case of e-KTP mega corruption that drags Novanto and other officials of his name. Because bad news is good because the media wants to reap the benefits of the magnitude of the news. In looking at the cause of the problem and the Kompas newspaper People's Daily Thoughts take the key actors in the case. In the e-KTP Corruption Cases Kompas and Daily Thoughts take Novanto standpoint because Novanto is chairman of the House and has a very large effect terhadap constitutional system of the country. Moral values presented typically lists their information from sources that the news fairly strong and visible. In the resolution of masalahnyan usually Kompas and People's Daily Thoughts contained in paragraph 2 / the last paragraph. So in making news Kompas and People's Daily Thoughts memFrame has its own way of news to be received by the community and the news became important for the community.

Keywords *Analysis Framing Robert N. Entman, E-Ktp, Kompas Daily and Pikiran Rakyat, Constructivism.*

1. Pendahuluan

Pada zaman yang semakin modern ini, masyarakat bisa mengakses berita dimanapun baik media cetak atau media elektronik, melalui perantara internet atau televisi, sedangkan koran di era modern ini masih *bereksistensi* di kala masyarakat sudah menggunakan *e paper & magazine*. Pemberitaan di media massa tentang kasus e-KTP ini semakin menjamur di segala media, baik media cetak dan media elektronik. Surat kabar atau yang dikenal dengan koran, merupakan salah satu media informasi yang ada di masyarakat. Surat kabar sudah dianggap sebagai media informasi yang *efisien* di samping televisi dan radio surat kabar merupakan media komunikasi yang berisikan informasi yang aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, olahraga, seni, luar negeri dan dalam negeri. Dan sebagainya surat kabar lebih menitikberatkan pada penyebaran informasi (fakta maupun peristiwa) (Syarifudin Yunus 2010 : 27)

Korupsi e-KTP merupakan salah satu korupsi yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Kerugian yang ditanggung negara dengan terbongkarnya praktik kotor ini mencapai Rp 2,31 triliun. Kasus e-KTP ini yang menyangkut salah satu ketua DPR Setya Novanto, dengan kasus mega korupsi Rp 2,3 triliun pada anggaran 2011 – 2013, Setya Novanto terjerat kasus e-KTP dengan beberapa kali panggilan KPK namun mangkir dengan alasan kesehatan dan dengan segala alasan yang tidak masuk akal, dalam harian Kompas berita tersebut menonjolkan frame yang berbeda dengan pemberitaan media yang lain, dimana harian Kompas lebih terang – terangan dalam menggemas suatu berita tentang kasus Setya Novanto ini, sebelum KPK memberikan informasi tentang Setya Novanto Kompas sudah terlebih dahulu memberikan informasi tersebut.

Dalam kasus ini intensitas waktu pemberitaan yang sangat lama berawal dari 9 Maret 2017 – 8 Maret 2018, dalam sidang pertama kasus korupsi e-KTP pengadilan tipikor membacakan dakwaan Irman dan Sugiharto yang menyebut keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Awalnya Novanto ditemui sejumlah pejabat Kementrian Dalam Negeri untuk meminta dukungan terkait proyek e-KTP, pada Februari 2010 di hotel Gran Melia, Jakarta. Saat itu yang menemui Novanto adalah dua terdakwa yang juga pejabat kementerian, Irman dan Sugiharto, sekjen kementerian Diah Anggraini dan pengusaha Andi Narogong, Novanto menyatakan dukungan. Pertemuan berikutnya dilakukan di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR RI. Saat ditanya bentuk dukungan, Novanto menjawab akan mengoordinasikan dengan pimpinan fraksi yang lain, kemudian sekitar Juli Agustus 2010, proyek e-KTP di bahas dalam anggaran rancangan APBN tahun 2011.

Salah satu media cetak ternama yaitu Pikiran Rakyat memberitakan tentang kasus Setya Novanto dari awal dugaan korupsi kasus E-KTP, dengan pemberitaan yang intens baik media cetak elektronik atau koran. Pada tanggal 8 Desember 2017 Setya Novanto menjadi terdakwa yang mula-mula tersangka menjadi terdakwa, faktanya pada saat perkara dibacakan tanggal 8 Desember Berdasarkan hal tersebut, Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 th 2001 tentang perubahan atas UU No 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Harian Kompas dalam menulis sebuah hard news mempunyai keunikan sendiri dari headline berita hingga isi berita tersebut membuat daya tarik pembacanya di setiap daerah oleh karena itu surat kabar Kompas sampai sekarang masih banyak penggunannya baik media daring atau

media cetak tersebut. Dalam kasus E-Ktp Setya Novanto yang di mulai 17 Juli 2017 hingga sekarang menjadi sebuah *polemic* dimana banyak sekali lika liku KPK dalam menangkap Setya Novanto, KPK mengumumkan Setya Novanto menjadi tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dengan kasus pengadaan E-Ktp kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat ketua fraksi Golkar di DPR ia diduga telah mengkondisikan penerimaan proyek dengan Andri Naragong, di duga membuat kerugian Negara hingga RP 2,3 triliun.

Harian Kompas dalam membuat berita mempunyai frame yang berbeda, baik mengambil sudut pandang aktor dalam kasus tersebut ataupun institusi yang berwenang dalam kasus tersebut, bagaimana frame itu dibuat agar masyarakat bisa percaya dan merasa kejadian itu nampak wajar oleh karena itu berita tersebut diselipkan keterangan dari narasumber terkait.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah (*natural setting*), peneliti langsung terjun ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. Metode deskriptif kualitatif tidak jarang melahirkan apa yang disebut Seltiz, Wrightsmulating, yakni peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian. (Ardianto, 2010: 60).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti membahas mengenai data sample berita dan wawancara mendalam dengan teknik analisis framing. Peneliti akan membahas hasil penelitian dari sudut pandang peneliti. Uraian hasil penelitian ini disesuaikan dengan analisis framing menurut Robert N.Entman yang menjadi fokus penelitian. Pembahasan dari sudut pandang peneliti didapatkan dengan menginterpretasikan hasil analisis dengan hasil penelitian.

Selama proses penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat perjanjian dengan informan untuk melakukan wawancara dan kesepakatan mengenai hal-hal apa saja yang bisa ditulis oleh peneliti dan yang tidak bisa ditulis oleh peneliti menyangkut kerahasiaan mereka agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Selain itu proses triangulasi sumber juga dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, dimana para

narasumber sangat mengenal baik para narasumber yang menjadi key informan dalam penelitian ini.

1. Berita Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat Edisi 11 Desember 2017

Judul : Kpk Siap Membeberkan Keterlibatannya Dalam Persidangan Bukti Setya Novanto Kian Kuat

Tabel 1.1

Berita Harian Pikiran 11 Desember 2017

<i>Define problems</i>	1. Kpk Siap Membeberkan bukti setya Novanto Bersalah.
<i>Diagnose causes</i>	2. Setya Novanto, Irman & sugiharto saling berkaitan.
<i>Make moral judgement</i>	3. Institusi Kpk dalam menangani kasus korupsi mempunyai bukti kuat dalam mengungkap kasus korupsi E-Ktp
<i>Treatment Recommendation</i>	4. Menunggu pengungkapan fakta oleh sanksi di persidangan

Define problems, pendefinisian masalah dalam pemberitaan ini yaitu pikiran rakyat memberikan informasi bahwa Kpk siap membeberkan bukti bahwa Setya Novanto terlibat dalam kasus E-Ktp tersebut.

Jakarta, (PR)- komisi Pemberantasan Korupsi siap Membeberkan bukti – bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Bukti bukti rekaman komunikasi , dokumen, dan surat dinilai akan menjelaskan bahwa Novanto merupakan aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Kata “membeberkan” yang ditulis di *lead* tersebut merupakan gambaran bahwa Kpk sedang berusaha membongkar suatu kasus besar yaitu kasus korupsi E-Ktp yang menyeret salah satu anggota partai politik dan salah satu ketua DPR, dengan demikian pikiran rakyat dalam memberitakan kasus ini sangat memperhatikan informasi yang di kemas agar sesuai fakta dan tidak condong kepada suatu golongan. Pikiran rakyat mbingkai berita ini dengan memilih sisi Kpk sebagai penegak hukum. Secara hukum Kpk adalah lembaga yang mempunyai

wewenang mutlak dalam memberantas korupsi, tanggung jawab Kpk bukan hanya kepada negara tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti Kpk mengemban penuh tanggung jawab tersebut dengan bersikap adil dan tidak pilih – pilih dalam menangani kasus korupsi. Terutama dalam kasus korupsi E-Ktp yang diduga melibatkan banyak nama besar. Oleh karena itu, peran Kpk dalam menangani kasus E-Ktp secara adil dan berimbang sangat penting.

Diagnose Causes, dalam keseluruhan berita penyebab masalah yang ditulis oleh harian Pikiran Rakyat terdapat pada sub judul yaitu:

“Bukti Novanto Kian Kuat”

Harian pikiran rakyat menyebutkan bukti Setya Novanto semakin kuat karena keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut, menurut juru bicara Kpk Febri Diansyah “menuturkan bukti bukti terangkum di dalam berkas dakwaan yang sudah yang dilimpahkan jaksa penuntut umum pada 6 Desember 2017 lalu”. Untuk proses penanganan perkara dan substansinya kami pastikan, Kasus KTP elektronik ini didukung oleh bukti yang kuat. Penyidikan sudah kami lakukan sejak lama, untuk tersangka pertama pada saat itu, Irman dan Sugiharto, sudah divonis bersalah di dalam pengadilan tinggi. Disana Pikiran Rakyat memberikan informasi bahwa kasus Ektp ini menyangkut salah satu pejabat dan kader partai politik.

Make Moral Judgement, merupakan elemen untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah.

Institusi Kpk dalam menangani kasus korupsi mempunyai bukti kuat dalam mengungkap kasus korupsi E-Ktp yang menyeret nama Setya Novanto sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut

Pada *lead* tersebut terdapat kata “Aktor intelektual” yang berarti Setya Novanto adalah kunci dari permasalahan kasus korupsi sebagai mana membenarkan argumen tersebut. Surat kabar harian Pikiran Rakyat bukan hanya membenarkan Setya Novanto sebagai tersangka namun memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam kasus tersebut banyak menyeret nama pejabat lainnya, namun dalam memberitakan berita tersebut harian Pikiran Rakyat mengambil sudut pandang KPK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberantas kasus Korupsi E-Ktp tersebut.

Treatment Recommendation, dalam kasus korupsi ini Kpk menunggu hasil persidangan karena sudah mempunyai bukti yang sudah kuat untuk membuktikan bahwa Setya Novanto bersalah, dengan permintaan Andi Naragong sebagai *justice Collaborator*. Andi mendapatkan *Justice Collaborator* karena dinilai *koperatif* dalam membantu Kpk menyelesaikan masalah kasus korupsi tersebut.

Berita Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat Edisi 14 Desember 2017

1. Judul : Karena “Drama”, Sidang Ditunda Lebih Dari 3 Jam Novanto terima uang 7.3 Juta Dolar AS

Tabel 1.2

Berita Harian Pikiran Rakyat 14 Desember 2017

<i>Define Problems</i>	1. Karena Drama Sidang Ditunda Lebih Dari 3 Jam
<i>Diagnose Causes</i>	2. Setya Novanto
<i>Make Moral Judgement</i>	3. Setya Novanto Tidak Bisa <i>Koperatif</i> Kelangsungan Sidang.
<i>Treatment Recommendation</i>	4. Sidang dilanjutkan ke tahap sidang kedua dengan pembacaan agenda eksepsi yang berkaitan dengan gugatan praperadilan pertama.

Define Problems, identifikasi dalam masalah pemberitaan ini adalah harian Pikiran Rakyat memberitakan bahwa “Drama” terjadi dalam sidang pertama kasus korupsi Setya Novanto hingga ditunda lebih dari 3 jam.

JAKARTA, (PR)- Setya Novanto didakwa menerima uang 7,3 Juta dolar AS dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Tak hanya itu, ia juga diduga melakukan intervensi sekaligus menjadi tokoh kunci sebelum proyek berlangsung, terutama dalam proses pembahasan dan penganggaran. Demikian terungkap di dalam sidang perdana yang berlangsung Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Dalam kata tersebut terdapat kata “drama” yang berarti harian pikiran memberikan argumen sebuah drama di dalam persidangan tersebut, yang mana “*lead*” di atas tercantum bahwa setya

novanto melakukan intervensi dan menjadi tokoh kunci dalam kasus korupsi KTP Elektronik tersebut.

Diagnose Causes, sumber permasalahan yang di tulis Pikiran Rakyat dalam pemberitaan ini adalah Setya Novanto, pada sidang pertamanya Novanto membuat drama yang seolah olah dia sakit dan tidak hadir dalam persidangannya.

Berdasarkan pantauan "PR", sidang yang di mulai pukul 10.00 berlangsung "alot" karena perdebatan soal kondisi Setya Novanto, bahkan Jaksa penuntut umum KPK mendatangkan 11 Dokter yang tergabung dalam ikatan dokter Indonesia(IDI).

Pada "Lead" kedua harian pikiran rakyat menuliskan kata "alot" yang berarti sulit dimana harian pikiran rakyat membuat argumen bahwa Setya Novanto membuat drama saat persidangan tersebut yang sedang berlangsung dengan dalih kesehatan Setya Novanto tidak bisa melanjutkan persidangan.

Make Moral Judgement, pembenaran argument Pikiran Rakyat terdapat paragraf ke empat dimana Setya Novanto saat hakim menanyakan identitas. Tetapi setya novanto malah "bergeming"

Kemarin, sesaat setelah hakim membuka sidang, sebuah "drama" terjadi. Hakim Yanto menanyakan identitas, tetapi Novanto malah bergeming. "Apakah Saudara bisa mendengar suara Saya?" tanya Yanto. Novanto tak menjawab. Hakim bertanya lagi, "Benar nama Saudara Setya Novanto?" Lagi-lagi, Novanto tidak menjawab. Berkali-kali dua pertanyaan itu dilontarkan hakim, tetapi Novanto tetap diam. Hakim kemudian bertanya kepada jaksa penuntut umum soal kondisi kesehatan Novanto. Jaksa Irene memastikan, Novanto dalam kondisi sehat. Hal itu didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter KPK Johannes Hutabarat, beberapa jam sebelum sidang. "Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami," ujarnya.

Pada "lead" di atas terlihat saat persidangan Setya Novanto tidak bisa bersifat *koperatif* dimana saat hakim bertanya setya novanto tidak bisa menjawab. Harian Pikiran Rakyat mengambil sudut pandang Hakim karena Hakim yang berwenang saat persidangan berlangsung dan hakim yang berhak memutuskan hasil kasus korupsi tersebut.

Treatment Recommendation, penyelesaian masalah kasus korupsi atas peran Setya Novanto yang membuat drama dalam persidangan Sidang di lanjutkan ke tahap sidang selanjutnya dengan agenda eksepsi.

Hakim Yanto menyatakan, Rabu (20/12/2017) mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi. ”Memahami dan mempelajari (butuh) waktu yang cukup untuk eksepsi. Seminggu dulu. Satu minggu selesai (diberi waktu untuk pelajari dakwaan). Jadi, terdakwa (Novanto) katanya kurang sehat. Diberi waktu seminggu, sebagaimana lazimnya. Kalau belum sehat, silakan kalau mau diopname,”

Pada “lead” di atas tertera kelanjutan sidang akan di lanjutkan kembali dengan agenda eksepsi hingga seminggu yang akan datang, di karenakan terdakwa (Novanto) kurang sehat, dan diberikan waktu satu minggu untuk beristirahat.

Berita Surat Kabar Harian Kompas edisi 9 desember 2017

2. Judul : "Melalui Surat, Setya Novanto Mengundurkan Diri sebagai Ketua DPR"

Tabel 1.3

Berita Harian Kompas 9 Desember 2017

<i>Define Problems</i>	1. Setya Novanto mundur dari ketua DPR melalui surat yang di tujukan kepada fraksi Partai Golkar
<i>Diagnose Causes</i>	2. Setya Novanto
<i>Make Moral Judgement</i>	3. Di tunjuknya azis syamsudin oleh setya novanto untuk menjadi ketua DPR.
<i>Treatment Recommendation</i>	4. Partai Golkar akan menggelar munaslub terkair mundurnya Setya Novanto

Define Problems, identifikasi dalam masalah pemberitaan ini adalah “melalui Surat, Setya Novanto Mengundurkan Diri Sebagai Ketua DPR”.

Jakarta,KOMPAS- Setya Novanto disebut sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR. Ketua

Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan soal surat pengunduran diri itu. "

Pada "lead" di atas terdapat kata "mengundurkan diri" yang artinya melepas jabatan sebagai pemimpin, harian Kompas dalam memberitakan Setya Novanto mengambil sudut pandang ia sebagai ketua DPR dan ketua umum Golkar. Oleh karena itu menyakinkan dalam argument yang berada di dalam berita tersebut. Setya Novanto disinyalir mundur karena terjerat kasus mega korupsi KTP Elektronik yang menyeret nama-nama pejabat, oleh karena itu Setya Novanto di pastikan mundur dari kursi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.

Diagnose Causes, sumber permasalahan yang di tulis Harian Kompas adalah Setya Novanto.

Setya Novanto disebut sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR. Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan soal surat pengunduran diri itu. "

Pada "lead" di atas harian Kompas menjelaskan bahwa Setya Novanto Mengundurkan diri melalui surat dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Sumber masalah dalam berita ini adalah Setya Novanto karena Setya Novanto sedang menjadi trending topik dalam pemberitaan akhir-akhir ini. Dengan segala akting nya dan dengan segala kecerdikannya menggelabui komisi tindak korupsi (KPK).

Make Moral Judgement, pembenaran argument harian Kompas terdapat pada paragraf kedua yaitu di tunjuknya Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto untuk menjadi ketua DPR.

DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan soal surat pengunduran diri itu. "Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem usai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017)

Pada "lead" di atas terdapat pembenaran argument Kompas dengan menyertakan Roem Kono yang menyatakan " memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa betul ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz" berarti harian Kompas

mengedepankan berita sesuai dengan fakta agar masyarakat bisa menerima informasi sesuai realita.

Treatment Recommendation, penyelesaian masalah ini adalah Partai Golkar akan menggelar munaslub terkait mundurnya Setya Novanto.

DPP Partai Golkar akan membicarakan soal surat Novanto ini dalam rapat pleno partai pekan depan yang akan membahas agenda musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR pada Jumat (8/12/2017) kemarin

Penyelesaian masalah ini terdapat pada “lead” di atas yaitu “munaslub” yang artinya Partai Golongan Karya akan mengadakan agenda musyawarah nasional luar biasa dengan pokok bahasan yaitu penggantian setya novanto dan rapat kader untuk penunjukan pengganti ketua DPR.

Berita Surat Kabar Harian Kompas edisi 14 Desember 2017

3. Judul : “Persidangan Novanto dan Keberanian Dokter Di Meja Hju”

Tabel 1.4

Berita Harian Kompas 14 Desember 2017

<i>Define Problems</i>	1. profesionalisme dan independensi hakim sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum
<i>Diagnose Causes</i>	2. Jaksa, Dokter, Setya Novanto dan KPK
<i>Make Moral Judgement</i>	3. Keputusan Beresiko
<i>Treatment Recommendation</i>	4. Dokter yang bertugas siap menanggung resiko dalam pemeriksaan kepada Setya Novanto

Problem Identification, identifikasi dalam masalah pemberitaan ini adalah profesionalisme dan independensi hakim sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum

Jakarta, KOMPAS- Berlangsungnya sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, tak bisa lepas dari peran dokter dan ahli medis. Persidangan yang digelar pada Rabu (13/12/2017) kemarin,

membuktikan bahwa profesionalisme dan independensi hakim sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Lebih spesifik lagi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tindakan para dokter tersebut mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada “*lead*” di atas terdapat kata “profesionalisme” dan “Independensi” yang artinya penegak hukum harus bersifat netral tanpa pandang bulu dalam menegakan hukum apalagi notabennya adalah kasus mega korupsi tersebut. Harian Kompas membuat berita dengan sudut pandang jaksa dan KPK karena lembaga tersebut yang mutlak memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Causal Interpretation, sumber permasalahan yang di tulis Harian Kompas adalah Jaksa, Dokter, Setya Novanto dan KPK.

Jakarta, KOMPAS- Berlangsungnya sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, tak bisa lepas dari peran dokter dan ahli medis. Persidangan yang digelar pada Rabu (13/12/2017) kemarin, membuktikan bahwa profesionalisme dan independensi hakim sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Lebih spesifik lagi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tindakan para dokter tersebut mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).). "KPK ucapkan terima kasih pada tim dokter ahli RSCM dan IDI. Pemberantasan korupsi memang butuh dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk kalangan medis," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (14/12/2017).

Pada keterangan di atas harian Kompas menuliskan fakta yang terjadi di dalam persidangan Setya Novanto Yang saling berkaitan antara jaksa dokter dan KPK, akting di mainkan oleh setya novanto akhirnya terungkap. Karena kebohongan setya novanto disaat sidang berlangsung yang pura pura sakit tercium oleh jaksa dan KPK dengan itu jaksa memanggil dokter dari ahli RSCM dan IDI agar memeriksa setya novanto apakah sehat atau tidaknya.

Moral Evaluation, membenaran argument harian Kompas terdapat pada paragraf ketiga yaitu Keputusan Beresiko.

Dalam persidangan kemarin, sejumlah dokter ahli yang berasal dari RS Cipto Mangunkusumo didatangkan ke pengadilan. Mereka kemudian diminta oleh hakim untuk memeriksa secara langsung kondisi kesehatan Setya Novanto. Seusai pemeriksaan, tiga orang dokter menyatakan Ketua DPR RI tersebut dalam kondisi yang

sehat dan layak mengikuti persidangan. Hasil pemeriksaan itu bertentangan dengan pengakuan Setya Novanto yang mengeluh sakit. Dalam persidangan, tim dokter diminta oleh hakim untuk masing-masing membacakan laporan hasil pemeriksaan kesehatan. Hakim bahkan sempat menanyakan pertanggung jawaban dokter mengenai hasil pemeriksaan itu.

Pada “*lead*” di atas terdapat kata “keputusan beresiko” yang artinya mengambil keputusan dengan memperhatikan dampak baik atau tidak nya. Harian Kompas mengambil sudut pandang dokter yang sedang bertugas menangani kasus setya novanto. Dokter di minta oleh hakim memeriksa keadaan setya novanto, hasil pemeriksaan tersebut bahwa setya novanto dalam kondisi yang sehat dan layak untuk melanjutkan persidangan. Dan hakim mempertanyakan pertanggung jawaban dari dokter atas hasil pemeriksaan tersebut.

Treatment Recommendation, penyelesaian masalah ini adalah Dokter yang bertugas siap menanggung resiko dalam pemeriksaan kepada Setya Novanto

ketiga dokter dengan tegas menyatakan siap mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan. Bahkan, sekalipun hal itu memiliki risiko hukum yang dapat merugikan mereka sendiri. "Apa bisa dipertanggung jawabkan? Karena hasil pemeriksaan ini bisa saja dipersoalkan oleh pengacara secara hukum nantinya," kata ketua majelis hakim Yanto. Atas pertimbangan itu, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan untuk pembacaan surat dakwaan.

Pada “*lead*” di atas terdapat keterangan bahwa dokter siap “mempertanggung jawabkan atas hasil pemeriksaan tersebut. Penyelesaiannya pada kasus ini berarti masih berlanjut dalam persidangan selanjutnya.

4. Analisis Framing Pikiran Rakyat

Dalam kasus korupsi E-ktip yang menjadi trending topik pemberitaan nasional hingga regional Harian Pikiran Rakyat sebagai salah satu media cetak yang masih “*eksis*” dalam produksi berita baik regional ataupun nasional. Harian Kompas sendiri memberitakan kasus Setya Novanto dalam kurun Waktu 1 desember hingga 31 desember 2017 sangat intens di karena berita tersebut berlanjut.

Dalam menggemakan suatu berita harian pikiran rakyat sangat mencermati sekali berita apa yang sedang menjadi trending dalam masyarakat, terlihat dalam berita tersebut sangat lah

“*independent, netral, dan tidak tergantung oleh pihak manapun*”. Terlihat dalam posisi beritanya pun sendiri sering kali mengambil sudut pandang institusi yang bersangkutan contohnya pada “*lead*” di bawah :

Jakarta, (PR)- komisi Pemberantasan Korupsi siap Membeberkan bukti – bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Bukti bukti rekaman komunikasi , dokumen, dan surat dinilai akan menjelaskan bahwa Novanto merupakan aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Pada “*lead*” di atas bagaimana harian Kompas membuat suatu “*Hard News*” dengan mengambil sudut pandang KPK sebagai Institusi yang bersangkutan untuk memberantas kasus korupsi.

Pada Proses Seleksi isu / Penonjolan isu itu sendiri Harian Pikiran Rakyat lebih mengedepankan Fakta di dalam persidangan dengan keterangan waktu yang jelas dan sumber wawancara dengan orang berwenang disaat persidangan tersebut.

5. Analisis Framing Harian Kompas

Harian Kompas adalah salah media cetak nasional yang sangat di perhitungkan dalam produksi beritanya sendiri. Karena harian Kompas mempunyai “*ke unikan sendiri*” di dalam berita yang di hasilkan nya. Harian Kompas dalam memberitakan selalu tepat dan akurat bahkan sebelum media yang lain memberitakan harian Kompas sudah terlebih dahulu memberitakan nya sendiri.

Pada kasus mega Korupsi E-KTP yang menjerat banyak nama pejabat yang menjadi tersangka salah satu nya Setya Novanto, Harian Kompas sangat buka – buka dalam memberitakan berita tersebut, dengan “*akting*” nya Setya Novanto disaat persidangan berlangsung hingga “*papa menabrak tiang listrik*” salah satu judul berita yang di muat oleh media harian Kompas.

Jakarta, KOMPAS- .Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, sudah berbohong dengan berpura-pura sakit. Hal ini disampaikan jaksa dalam sidang dakwaan Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12/2017). Awalnya, hakim

bertanya kepada Novanto mengenai nama lengkapnya. Namun, Novanto tampak lamban merespons berbagai pertanyaan hakim. Beberapa kali dia tidak menjawab. Dengan suara pelan dan Novanto mengaku sakit.

Dalam keterangan di atas Harian Kompas Menjelaskan Kronologi saat Persidangan bahwa Setya Novanto pura pura sakit dan berbohong di saat persidangan, dengan akting nya itu membuat Jaksa memanggil sejumlah dokter dari Ahli RSCM untuk memeriksa Setya Novanto.

Harian Kompas dalam membuat sebuah berita dengan memperhatikan fakta yang ada oleh karena itu dalam mengemas sebuah berita mempunyai frame yang berbeda dalam setiap beritanya, untuk kasus setya novanto ini harian Kompas condong berpihak kepada pemerintah dimana korupsi harus di berantas hingga akar akarnya dengan informasi tersebut masyarakat bisa menerima berita yang sesuai dengan faktanya Dengan (*one cover side*) harian Kompas cenderung keberpihakan kepada KPK dan kontra terhadap Setya Novanto.

Daftar Pustaka

- Ardial, H. 2015. *Paradigma Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ardianto E, dkk. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arsyad Azhar (2006). *Media Cetak*. Airlangga.
- Bungin (2003). *Paradigma Penelitian*.
- Citra Bung Karno(1999). *Analisis Berita Pers Orde Baru*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- Eriyanto (2012). *Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- LkiS Printing Ceerlang.
- Mc Quail(1989). *Mass Communication Theories*.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Nurhadi(2012). *Metodolgi Penelitian*.
- Rahardi Kunjana (2011). *Bahasa Jurnalistik*. Ghalia Indonesia.
- Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*. Bandung: Batic Press.
- Sudibyo Agus (2001). *Tinjauan Teoritis Analisis Framing*.

Sumber Skripsi:

Boby Tridona 2015. *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Gubernur DKI dan DPRD DKI di media online kompas.com & detik.com* Fakultas ilmu komunikasi Universitas lampung.

Gema Mawardi 2011. *Pembingkaiian Media Online (Analisis Framing Berita mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar Mediaindonesia.com vivanews.com 7september 2011)* Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, Depok.

Kristanto hartadi, 2011 Tentang : *Analisis Framing studi kasus kompas dan media Indonesia dalam liputan kerusuhan di temanggung 9 Febuari 2011, fakultas ilmu social dan politik Universitas Indonesia, Depok.*

Jurnal :

Robert M. Entman, “Framing U.S. Coverage of International News: Contrast in Narrative of the KAL and Iran Air Incidents”, dalam *Journal of Communication*, Vol. 41 , No. 4, 1991, hal 6-27..

Todd Gitlin, *The Whole World is Watching : Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*, (California: Universitas of California Press, 1880), hlm.6

Robert M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, hlm.53

Internet:

Pengertian Media Cetak (Perkembangan Media Informasi di Indonesia) [Diakses pada tanggal 20 Januari 2018]. Tersedia di

<https://www.freshbugar.com/2017/02/pengertian-media-cetak.html>

Jenis – Jenis Media Cetak (8 Contoh Media Cetak yang sering di gunakan)

[Diakses pada tanggal 25 Januari 2018]

<https://www.grafis-media.website/2017/02/8-macam-media-cetak.html>

Melihat Perjalanan Setya Novanto Dalam Kasus E-Ktp pada 2017

